

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH DALAM PELAYANAN PAMONG BELAJAR DI SKB KOTA YOGYAKARTA

Suryanti¹, Musdar Saidi²

¹MMPI FITK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

²MPAI FITK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹Suryant40@gmail.com, ²musdarputrasaidi1997@gmail.com

ABSTRACT

School-Based Quality Improvement Management (MPMBS) is part of the school-based management program (SBM) which is the antithesis of centralized management through decentralization programs in the field of education and high community participation. This autonomy is given so that schools are more flexible in managing all resources by managing according to priority needs so that schools are more responsive to the needs of their users or the surrounding community. In the context of implementing education carried out by the SKB, the role of tutors is very important, especially in efforts to improve the quality of tutoring services in out-of-school education. Therefore, the competence of tutors must continue to be improved through formal and non-formal education, because the higher the competence, the more optimal it is in improving the quality of its services, therefore research is needed to understand it. current situation. This study aims to describe the efforts of Special Counselors of Yogyakarta in improving the quality of education and counseling services outside of school. This research also uses a qualitative approach in the form of descriptive methods and data collection procedures in the form of interviews, observations, and literature studies. While the objects of research are tutors, administrative implementers, tutors, supervisors, and learning residents, as well as data documentation/instruments of activities resulting from activities related to efforts to improve the quality of service in SKB Yogyakarta City.

Keywords: school-based management & quality of tutoring services at skb yogyakarta city.

ABSTRAK

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) adalah bagian dari program manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan antithesis atas manajemen terpusat melalui program desentralisasi bidang pendidikan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Otonomi tersebut diberikan agar sekolah lebih leluasa mengelola semua sumber daya dengan mengelola sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga sekolah lebih tanggap dengan kebutuhan penggunaannya atau masyarakat sekitarnya. Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh SKB peran dari pamong belajar sangat penting terutama

berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan pamong belajar pada Pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu kompetensi dari para pamong belajar harus terus ditingkatkan baik dengan jalur Pendidikan formal maupun non formal, karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka akan lebih maksimal dalam meningkatkan mutu pelayanannya, akibatnya, diperlukan penelitian untuk memahami situasi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya SKB Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan konseling di luar sekolah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif berupa metode pustaka. Sementara itu yang menjadi objek penelitiannya adalah pamong belajar, pelaksana administrasi, tutor, pengawas, dan warga belajar, serta data dokumentasi/instrument kegiatan hasil kegiatan kegiatan.

Kata Kunci: manajemen berbasis sekolah & mutu pelayanan pamong belajar di skb kota yogyakarta.

A. Pendahuluan

Konsep manajemen berbasis sekolah pertama kali muncul di Amerika Serikat. Hal itu dilatarbelakangi oleh masyarakat yang pada saat itu mempertanyakan tentang relevansi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dengan tuntutan kebutuhan masyarakat (Bafada, 2006). Kinerja sekolah pada saat itu dianggap tidak sesuai dengan tuntutan peserta didik untuk terjun ke dunia usaha dan sekolah dianggap tidak mampu memberikan hasil dalam konteks kehidupan ekonomi kompetitif secara global (Rais, 2004). Dengan begitu muncullah penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang memodifikasi struktural pemerintahan

ke sekolah dengan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Arcoro, 2006).

Manajemen MBS merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasi yang melibatkan warga sekolah seperti guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, orangtua peserta didik, dan masyarakat yang berhubungan program sekolah sehingga rasa memiliki warga sekolah dapat meningkat rasa tanggung jawab dan dedikasi warga sekolah (Subroto, 2008). Dengan menggunakan MBS, sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan sesuai dengan

kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat.

Atas dasar uraian di atas, perlu kiranya adanya upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan Pendidikan luar sekolah sehingga hasilnya akan lebih baik, kenyataan di lapangan dalam pengembangan Pendidikan luar sekolah masih terkesan asal-asalan sehingga mutu layanan kurang mendapat sambutan yang menggembirakan. Pendidikan luar sekolah merupakan usaha, proses atau Gerakan upaya masyarakat sebagai suatu organisasi, atau system social bisa menjadi penolong bagi dirinya sendiri, gerakannya melalui bimbingan-bimbingan dan pendekatan secara persuasive baik secara individual maupun kolektif

Pendidikan luar sekolah didefinisikan sebagai pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal dan disiapkan oleh pendidik sasaran untuk mencapai tujuan tertentu. Ini juga mencakup pendidikan yang tidak mengikuti tingkat atau dimensi tertentu dari adaptasi pendidikan persyaratan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan yang

dilaksanakan oleh SKB peran dari pamong belajar sangat penting terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan pamong belajar pada Pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu kompetensi dari para pamong belajar harus terus ditingkatkan baik dengan jalur Pendidikan formal maupun non formal, karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka akan lebih maksimal dalam meningkatkan mutu pelayanannya, akibatnya, diperlukan penelitian untuk memahami situasi saat ini.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan program-program Pendidikan Luar Sekolah perlu kiranya peningkatan kemampuan pamong belajar sebagai ujung tombak selaku penyelenggara dan pelaksana program-program Pendidikan luar sekolah baik yang diselenggarakan di kampus SKB itu sendiri maupun kelompok-kelompok belajar yang dibentuk di setiap Desa/Kelurahan-Kelurahan. Pamong Belajar harus memahami betul mengenai program-program Pendidikan luar sekolah, tujuan Pendidikan luar sekolah serta

sasaran-sasaran Pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya bagaimana upaya meningkatkan mutu pelayanan pamong belajar pada Pendidikan luar sekolah di SKB Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut akan dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara dengan Pamong Belajar, Pelaksana Administrasi, Tutor serta studi dokumentasi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan (library research) yaitu pengkajian data dari berbagai sumber dan literatur serta pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode content analysis, yaitu mempelajari dan menelaah bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang ada hubungan dengan permasalahan tentang membangun jejaring dan kerja sama.

Pengumpulan data dari beberapa sumber literatur dimulai dari proses edit atau editing, catatan, dan

informasi yang dikumpulkan oleh penulis. Proses kedua adalah klasifikasi, pada tahapan ini penulis mereduksi data dengan menyusun dan mengklasifikasikannya menjadi sebuah pola tertentu. Demi suatu kemudahan pembahasan dan pembacaan suatu pola lazim dibentuk oleh penulis. Analisis Data Proses ketiga yaitu analisis data, ketika penulis mendapatkan data yang valid maka cukup untuk dilakukan analisis. Tentunya proses analisis menggunakan pendekatan kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan secara langsung semua kelompok di sekolah seperti pamong, tutor, siswa, orang tua siswa dan masyarakat agar bersama-sama meningkatkan mutu sekolah sesuai

visi dan misi yang sudah dirancang. Sekolah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya jika **mendapatkan otonomi lebih besar sehingga** sekolah dapat lebih mandiri. Sekolah juga menjadi lebih mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan cita-cita dan potensi yang dimilikinya. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) adalah bagian dari program manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan antithesis atas manajemen terpusat melalui program desentralisasi bidang pendidikan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Otonomi tersebut diberikan agar sekolah lebih leluasa mengelola semua sumber daya dengan mengelola sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga sekolah lebih tanggap dengan kebutuhan penggunaannya atau masyarakat sekitarnya.

1. **Pengertian MBS**

Berdasarkan fungsi pokoknya, istilah manajemen mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Merencanakan (planning),
- b. Mengorganisasikan (organizing),
- c. Mengarahkan (directing),

- d. Mengkoordinasikan (coordinating),
- e. Mengawasi (controlling), dan
- f. Mengevaluasi (evalunatio).

Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Usaha mewujudkan pendidikan nasional salah satunya ditempuh melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau (School Based Managemen)(Siwantari dkk., 2011).

Manajemen berbasis sekolah dapat bermakna adalah desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas(Nurkholis, 2003).

2. **Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah.

MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka (Fuad, 2001).

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid (Suhendar, 2015). Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.

Para pendukung MBS menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki lebih banyak maslahatnya ketimbang pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka,

serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran (Sulistiyorini & M.Fathurrohman, 20016). Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MBS bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi

Penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut :

- a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran
- b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
- c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
- d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk

mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.

- e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
- f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level

3. Landasan Kebijakan MBS

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1; "Manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan" (Syafaruddin, 2015).

Legalisasi pelaksanaan MBS juga termuat dalam peraturan turunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 49 ayat 1: "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen

berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas"(Mutohar, 2014)

4. Pentingnya Penerapan MBS

Depdiknas memberikan 10 alasan dibalik pemberlakuan kebijakan MBS, sebagaimana berikut:(Prasetya, 2014).

- a. Bila sekolah memiliki otonomi yang lebih besar maka sekolah akan lebih leluasa dalam mengekspresikan keaktifan atau kreatifitasnya dalam meningkatkan mutu sekolah;
- b. Bila sekolah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber dayanya maka sekolah akan lebih lincah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah;
- c. Bila sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada maka sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam memajukan sekolah;
- d. Bila sekolah lebih mengetahui input pendidikan lembaganya maka sekolah dapat mendayagunakannya dalam

- proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
- e. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolah;
 - f. Bila masyarakat sekitar sekolah mengontrol penggunaan sumber daya pendidikan maka penggunaannya akan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - g. Bila seluruh warga sekolah dan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah maka akan tercipta transparansi dan demokrasi yang sehat;
 - h. Bila sekolah bertanggung jawab secara langsung terhadap orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah, maka sekolah akan berupaya secara optimal dalam pelaksanaan pencapaian mutu pendidikan yang telah direncanakan;
 - i. Dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah, maka sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah

Dari kesepuluh alasan yang dikemukakan oleh Depdiknas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberlakuan kebijakan MBS adalah peningkatan mutu pendidikan melalui model pengelolaan sekolah yang lebih demokratis. Menurut Slamet PH secara empiris, memang MBS perlu diimplementasikan sebab model pengelolaan sekolah secara sentralistis yang telah cukup lama diterapkan terbukti kurang mengakomodasi kebutuhan sekolah, menumpulkan daya kreatifitas sekolah, dan mengikis *habissense of belonging* warga sekolah terhadap sekolahnya (Rohman, 2009).

5. Tujuan Penerapan Model MBS

Desain pengelolaan sekolah menggunakan MBS bertujuan memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam memperbaiki kinerja sekolah mencakup kepemimpinan sekolah, profesionalisme guru, layanan belajar peserta didik yang bermutu, manajemen sekolah yang bermutu, partisipasi orangtua peserta didik dan masyarakat. Menurut Satory penerapan MBS bertujuan:(Mutohar, 2014).

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdaya sumber daya dan potensi yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah.
- d. Meningkatkan kompetensi yang sehat antarsekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.

6. Prinsip MBS

Penggunaan model MBS menunjukkan bahwa manajemen sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan pengayaan kurikulum dalam berbagai bentuk. Misalnya menambah mata pelajaran yang ingin ditingkatkan kadar dan mutu pembejarannya, memperkaya pokok atau subpokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan konteks kebutuhan anak di sekolah, dan memberi perhatian khusus pada

pengembangan bakat dan minat peserta didik(Winardi, 2012).

Sesuai dengan prinsip tersebut, sekolah memiliki kewenangan menetapkan sumber pelajaran, fasilitas dan alat pembelajaran yang diperlukan seperti buku sumber atau bahan text book mata pelajaran yang akan dipakai, alat peraga dan media pendidikan, bahan-bahan yang digunakan di laboratorium dan bengkel kerja, dan melakukan pertumbuhan jabatan guru mapun tenaga kependidikan guna meningkatkan kinerja sekolah.

7. Karakteristik MBS

Manajemen berbasis sekolah menurut Sagala memiliki karakteristik sama dengan sekolah yang efektif, yaitu:(Rohman, 2009).

1. Memiliki output, yaitu prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif.
2. Efektifitas proses belajar mengajar yang tinggi
3. Peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia.
4. Lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman

sehingga manajemen sekolah lebih efektif.

5. Melakukan analisa kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja,, hubungan kerja, dan imbalan jasa tenaga kependidikan dan guru yang dapat memenuhi kebutuhan nafkah hidupnya sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
6. Pertanggungjawaban sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
7. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepantasnya dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan riil untuk meningkatkan mutu layanan belajar.

8. Dampak Penerapan MBS

MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah (Susi Susilawati, 2009). Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya

memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.

MBS juga dipandang dapat meningkatkan prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperan serta merencanakannya.

Penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS adalah:(Hari, 2005).

- a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
- b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
- c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.

- d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
- e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
- f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

9. Pengaruh MBS Terhadap Peran Pemerintah Pusat, Daerah, dan Dewan Sekolah

MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan hanya sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Pemerintah pusat, dalam rangka pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja masih menjalankan politik pendidikan secara nasional. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang antara lain mencakup standar kompetensi, standar fasilitas dan peralatan sekolah, standar kepegawaian, standar kualifikasi guru, dan sebagainya.

Penerapan standar disesuaikan dengan keadaan daerah. Standar ini kemudian dioperasionalkan oleh pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dengan melibatkan sekolah-sekolah di daerahnya. Namun, pemerintah pusat dan daerah harus lebih rela untuk memberi kesempatan bagi setiap sekolah yang telah siap untuk menerapkannya secara kreatif dan inovatif. Jika tidak, sekolah akan tetap tidak berdaya dan guru akan terpasung kreativitasnya untuk berinovasi (Hersey & Blanchard, 1988). Pemerintah harus mampu memberikan bantuan jika sekolah tertentu mengalami kesulitan menerjemahkan visi pendidikan yang ditetapkan daerah menjadi program-program pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemerintah daerah juga masih bertanggung jawab untuk menilai sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Peningkatan Mutu Pelayanan Pamong Belajar Di Skb Kota Yogyakarta

1. Pemahaman Pamong Belajar tentang program Peningkatan Mutu Pelayanan

Pemahaman Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar dalam program meningkatkan mutu

pelayanan pendidikan luar sekolah melakukannya dengan Langkah-langkah sebagai berikut:(Donna, S dkk., t.t.)

- a. Merumuskan program yang menjadi prioritas bagi peningkatan mutu layanan Pendidikan luar sekolah dengan cara menyiapkan seluruh komponen-komponen yang ada mulai dari pendanaan, peralatan, modul/bahan ajar, metode pembelajaran, menyiapkan lingkungan yang sesuai serta memadai.
- b. Mengkoordinasikan Langkah-langkah kerja bagi peningkatan mutu layanan Pendidikan luar sekolah dengan cara melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lainnya, dengan stake holder dan pihak-pihak yang terkait secara continue dan berkelanjutan.
- c. Melakukan langkah-langkah kerja bagi peningkatan mutu layanan Pendidikan luar sekolah berdasarkan program kegiatan yang telah dibuat.
- d. Mengukur keberhasilan dengan pencapaian program kerja yang telah ditetapkan,

dengan cara mengadakan evaluasi kepada setiap warga belajar sesuai dengan program yang diikutinya.

- e. Melakukan monitoring terhadap program-program kerja yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan harapan.
- f. Mendorong serta memotivasi semua staf dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya.

2. Pamong Belajar Mengimplementasikan Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Komponen yang paling penting dari pelaksanaan Pendidikan luar sekolah adalah keberadaan pamong belajar yang merupakan dinamisator, fasilitator sekaligus motivator dalam memberikan layanan Pendidikan luar sekolah. Agar pamong belajar dapat memberikan suatu layanan yang optimal terhadap Pendidikan luar sekolah diperlukan kemampuan-kemampuan pamong belajar sebagai berikut:(Sudjana, 1991).

a. Kemampuan dalam menyiapkan program latihan, yaitu a) menyusun rencana acara pembelajaran, b) menyusun materi belajar, dan c) menyusun alat evaluasi.

b. Kemampuan dalam melaksanakan proses dalam pembelajaran dalam latihan, yaitu a) Penguasaan materi, b) Penguasaan metode belajar, c) Penguasaan media pelatihan, d) Penguasaan kelas, dan e) Kemampuan berkomunikasi.

c. Kemampuan dalam menyiapkan program latihan, yaitu a) Kemampuan mengevaluasi hasil belajar, b) Kemampuan menganalisis hasil evaluasi, dan c) Kemampuan menyajikan hasil evaluasi.

Kemampuan-kemampuan tersebut mencerminkan tingkat keterampilan manajerial dari pamong belajar sehingga dapat dinyatakan bahwa apabila kemampuan manajerial pamong belajar memadai, maka dapat diasumsikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pamong belajar dapat memberikan layanan

yang optimal terhadap Pendidikan luar sekolah yang berkualitas(Sudjana, 2000)

3. Upaya Mengatasi Berbagai Hambatan dalam Pengimplementasian Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pamong Belajar dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengimplementasian program peningkatan mutu pelayanan adalah:(Tim Penyusun, 2011) a. Untuk mengatasi hambatan kurangnya motivasi belajar dengan memberikan motivasi bimbingan, arahan serta ajakan-ajakan kepada masyarakat agar dapat ikut dalam kegiatan Pendidikan luar sekolah, selanjutnya memberikan sosialisasi bahwa kegiatan yang diberikan untuk menambah kemampuan dan keterampilan kepada peserta warga belajar. Motivasi-motivasi yang dilakukan oleh pamong untuk berorientasi kerja menuju mutu layanan Pendidikan luar sekolah melalui mekanisme penyampaian informasi sebagai berikut:(Donna, S dkk., t.t.).

- a. Ia yakin mampu mengerjakan.
- b. Ia yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
- c. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak.
- d. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan.
- e. Hubungan antar bawahan dalam organisasi harmonis.

Agar kelima prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pertama yang harus dilaksanakan adalah membuat situasi yang kondusif agar para pamong merasa harmonis sehingga upaya kerja menuju layanan Pendidikan luar sekolah dapat tercapai (Anwas Oos, 2013).

1. Untuk mengatasi kurangnya peralatan upaya yang dapat dilakukan dengan menambah sarana sesuai dengan kebutuhan, serta sarana yang ada fungsinya dimaksimalkan.
2. Upaya untuk mengatasi modul atau bahan ajar yang masih kurang, Pamong Belajar menambah sesuai dengan jumlah

siswa dan sebelum kegiatan dilaksanakan, bahan ajar harus sudah selesai.

3. Upaya untuk mengatasi kurangnya partisipasi warga dengan cara diberikan motivasi, dukungan serta didukung dengan suasana kerja yang menyenangkan.
4. Upaya untuk mengatasi suasana lingkungan yang kurang baik, Pamong Belajar melakukannya dengan cara menciptakan lingkungan yang indah, bersih, asri dan menyenangkan.
5. Upaya untuk mengatasi hambatan kurangnya kompetensi tutor dalam menjalankan tugasnya, mereka diberikan bimbingan, pembinaan, serta kursus-kursus, pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

E. Kesimpulan

Kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, nilai, dan praktik yang di dalamnya terdapat unsur legalitas (kepemerintahan). Kebijakan pemerintah dalam administrasi (manajemen) pendidikan yang terbaru adalah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS merupakan

suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk melakukan redesain terhadap pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan pada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Memberikan motivasi kepada pelaksanaan (pamong) untuk berorientasi kerja menuju mutu layanan Pendidikan luar sekolah. Dengan cara memotivasi warga belajar untuk mau mengikuti Pendidikan program di Pendidikan luar sekolah (SKB). Dengan mengadakan kerjasama yang baik terhadap warga belajar, sehingga mereka memahami, mengerti dan akhirnya mau berpartisipasi meningkatkan pelayanan mutu.

Landasan yuridis terhadap pelaksanaan MBS terdapat dalam perundangan-undangan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1 dan juga peraturan turunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 49 ayat 1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan khususnya Pendidikan luar sekolah belum bisa memberikan hasil yang lebih berkualitas.

MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan hanya sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Penerapan MBS memberikan berbagai dampak dalam peningkatan mutu pendidikan. Diantara dampaknya seperti terciptanya lingkungan belajar yang efektif bagi siswa dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun, juga banyak terdapat hambatan dalam menjalankannya seperti pihak-pihak struktural sekolah yang tidak ingin mendapat tambahan pekerjaan dan ketidakpahaman mereka terhadap aplikasi MBS itu sendiri..

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas Oos. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Penerbit Alfabeta.
- Arcoro, J. S. (2006). Pendidikan Berbasis Mutu. Pustaka Pelajar.

- Bafada, I. (2006). Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi menuju Desentralisasi. PT Bumi Aksara,.
- Donna, S, Linda, D., Marie, V., & Berge, Z.,. (t.t.). The Increasing Scope of Training and Development Competency.
- Fuad, N. (2001). Manajemen Berbasis Sekolah,' makalah Pelatihan Pengelolaan Madrasah Aliyah untuk Pengurus Pesantren di Pusdiklat. Depdiknas Sawangan.
- Hari, S. (2005). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Cipta Karya Grafika.
- Hersey, P., & Blanchard. (1988). Management of Organizational Behavior,. Englewood Cliffs,.
- Mutohar, P. M. (2014). Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam. Ar-Ruzz Media.
- Nurkholis. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah ; Teori, Model dan Aplikasi, . Grasindo.
- Prasetya, I. (2014). Logika dan Prosedur Penelitian. ST1A- LAN. Hanke, John E. et. all.
- Rais, M. A. (2004). Hubungan Antara Politik Dan Dakwah (hlm. 36). Mujahid Press.
- Rohman, A. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Laks Bang Mediatama.
- Siwantari, Hardianto, & Umaedi. (2011). Manajemen Berbasis Sekolah. Universitas Terbuka,.
- Subroto, B. S. (2008). Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Rieneka Cipta.
- Sudjana. (2000). Manajemen Program Pendidikan: Untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Falah Production.
- Sudjana, D. (1991). Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah dan Teori Pendukung Azas. Uninus.
- Suhendar. (2015). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MPMBS/M).
- Sulistiyorini, & M.Fathurrohman. (20016). Implementasi Manajemen.
- Susi Susilawati, H. (2009). Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja Lulusan Siswa Smk Negeri Di Kotamedan, (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Syafaruddin. (2015). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Ciputat Press.". Tim Penyusun. (2011). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Winardi, G. R. T. (2012). Asas-Asas Manajemen. Alumni.